



MENJAGA NETRALITAS ASN

Prof. R. Siti Zuhro, MA, PhD
(Peneliti Ahli Utama BRIN)
Jakarta, 4 Juni 2024

PENDAHULUAN

ASN netral Yes
Berpolitik praktis
No

Isu netralitas birokrasi senantiasa menjadi topik yang diperdebatkan dalam pemilu/pilkada.

Terjadi tarikan-menarik politik yang sangat kencang baik selama pemilu maupun setelah pemilu/pilkada.

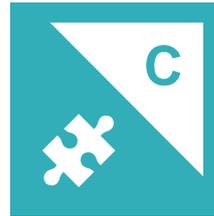
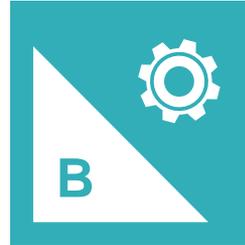
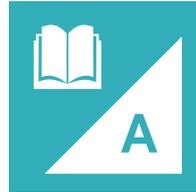
Sistem multi partai banyak menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi. Kekuatan politik acap kali mengintrusi birokrasi sehingga sulit netral.

POLITIK DAN BIROKRASI -1

- Menurut Harold Lasswell, *politics is who gets what, when, and how*. Demokrasi memberikan ruang kebebasan sipil dan politik sebagai wujud demokrasi (kebebasan berbicara dan berserikat).
- Politik berkaitan dengan kebijakan (policy), kepentingan dan kekuasaan.
- Kultur politik Indonesia masih patrimonial: proses pembuatan keputusan yang masih top-down. Sistem patrimonialisme dan patronase yang relatif masih kuat di Indonesia. Hal ini berpengaruh pula terhadap partai politik.
- Fenomena tersebut memperlihatkan adanya “the coexistence of patrimonialism with modernisation” sebagaimana bisa ditemui di banyak negara berkembang lainnya.

POLITIK DAN BIROKRASI - 2

Birokrasi harus netral. Birokrasi sifatnya hierarkis dan berkaitan langsung dengan administrasi.



Birokrasi juga perlu menggunakan standar pelayanan publik yang profesional, transparan dalam hal biaya dan waktu (untuk menjaga public accountability), dan menerapkan *merit system* (pengangkatan karena keahlian, pengawasan kolektif dan obyektif).

Birokrasi mempertimbangkan kerja tim dan kontrol rekan kerja (peer group) agar birokrasi tidak didominasi atau dikontrol oleh atasan saja. Birokrasi perlu kompetitif di dalam dan antar bagiannya.

Pentingnya Etika Politik dalam Berdemokrasi



Pelaksanaan demokrasi berpengaruh thd birokrasi. Karena itu etika politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa agar nuansa politik lebih sehat dan rasional. Etika politik juga diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu/pilkada agar pemilu/pilkada tidak ternoda dan hasil pemilu tidak cacat secara hukum.



Pelanggaran terhadap etika politik dalam pemilu/pilkada acapkali didorong oleh alasan tiadanya payung hukum yang bisa dijadikan rujukan dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia karena hukuman (penalty) yang tidak jelas.

Sistem yang ada juga acapkali disebut sebagai penyebab utamanya karena terkesan memberi peluang penyimpangan.

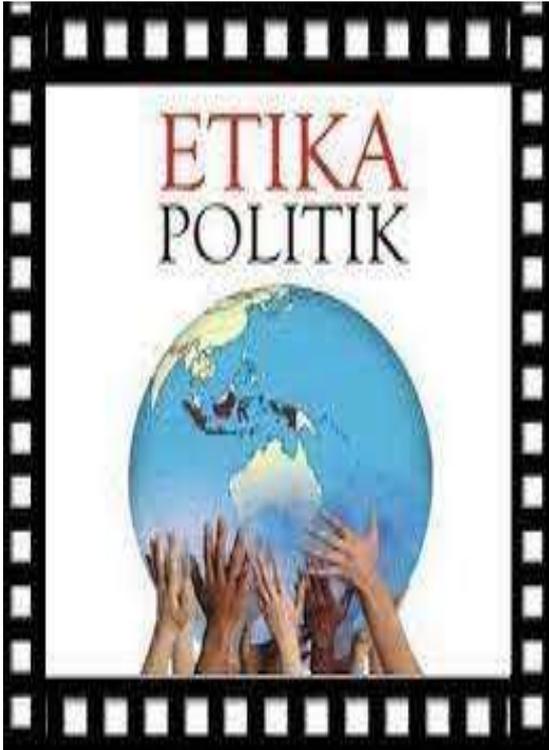
Etika politik terkait dengan moral politik. Sedangkan politik oleh para politisi hanya dimaknai sebagai “penyalur kepentingan” dan seni untuk “meraih kekuasaan” saja.

Moral politik mengandung makna yang sangat dalam dan terkait dengan nilai-nilai. Bila moral politik ini absen, yang akan muncul kemudian adalah politik menghalalkan semua cara.

Etika politik diperlukan untuk meredam kecenderungan politik menghalalkan semua cara tersebut.

Para elite, aktor dan tokoh seharusnya mampu merefleksikan nilai-nilai atau etika politik yang meneladani yang diharapkan berpengaruh positif terhadap pemilu yang jujur, adil dan luber (langsung, umum, bebas, rahasia atau free and fair).

Pentingnya Etika Politik dalam Berdemokrasi



- Berdemokrasi dan berpolitik yang berlandaskan Pancasila tidak hanya berpegang pada kaidah hukum, tetapi juga pada kesadaran dan kepantasan moral yang mengedepankan etika nilai-nilai Pancasila.
- Bangsa Indonesia harus konsisten dalam mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam bentuk rasa malu dan siap mundur ketika dirinya melanggar etika/moral dan hukum.
- Budaya malu dan mundur ini sangat relevan, signifikan dan urgen diterapkan oleh Indonesia di saat negeri ini terpuruk oleh menipisnya etika/moral dan maraknya skandal korupsi.
- Demokrasi tidak boleh direduksi atau disimpangkan maknanya semata-mata hanya merebut kekuasaan saja.
- Kedaulatan harus tetap di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa dan/atau lembaga politik.

Aparatur negara tidak hanya berperan penting dalam melakukan reformasi birokrasi, tapi juga dalam membangun nilai-nilai budaya demokrasi.

Ketaatan dan komitmen para aparatur negara sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan etika dan keadaban politik.

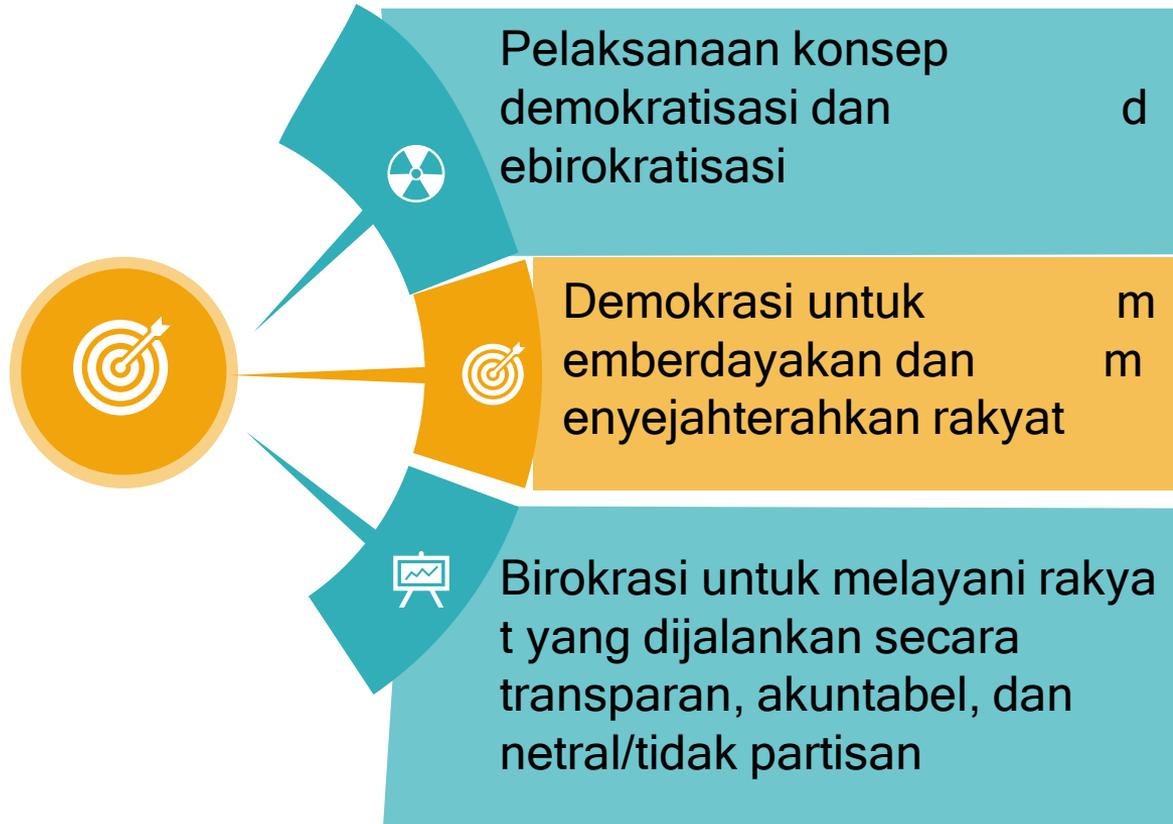
Para aparatur negara perlu menggerakkan mesinnya agar SDM birokrasi bekerja profesional. Pada saat yang sama para aparatur negara juga memiliki tugas mulia untuk melakukan perbaikan birokrasi dan demokrasi agar nilai-nilai budaya politik yang terbangun bisa menopang terwujudnya pemilu/pilkada serentak yang berkualitas.

PERAN APARATUR NEGARA



LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Semakin transparan dan akuntabel birokrasi akan sulit diintervensi kekuatan politik/parpol



2

Memupuk vitalitas demokrasi melalui pengembangan nilai, etika, dan keterampilan demokrasi di kalangan aparatur negara, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kepentingan publik.

Etika politik dalam berdemokrasi sangat penting, dan secara khusus diperlukan etika politik para penyelenggara negara (pejabat publik) supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan publik.





Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa netralitas ASN dalam politik sangat krusial. Tidak netralnya/keterlibatan ASN (aparatur negara dalam politik praktis menyebabkan kemunduruan birokorasi dan menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif/tidak *governability*. Politisasi ASN sangat merugikan dan dampaknya sangat buruk terhadap hasil pemilu/pilkada karena membuatnya distoratif dan demokrasi tidak substantif.

(R. Siti Zuhro)

Terimakasih